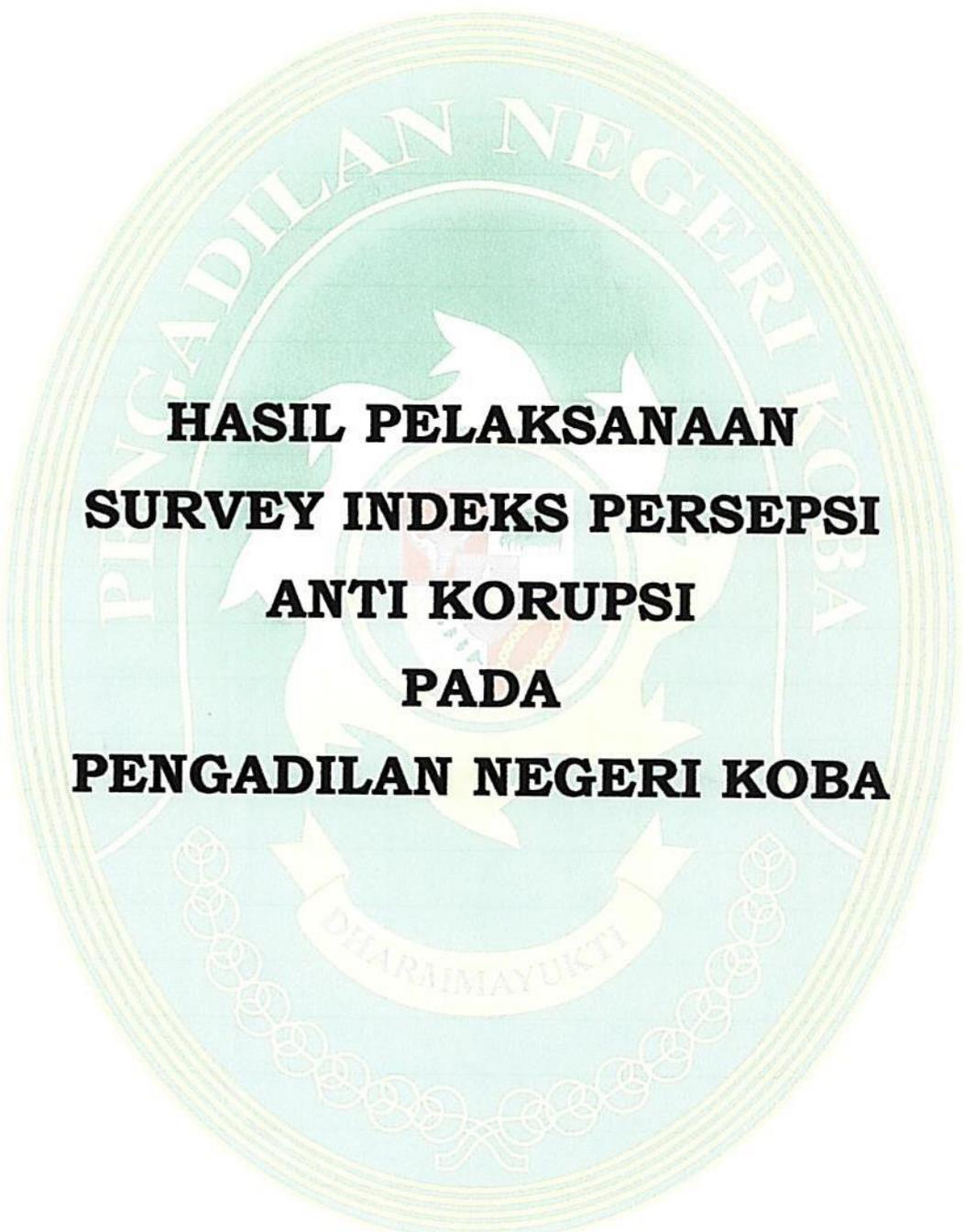


LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEY INDEKS PERSEPSI
ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI KOBAB**

**TRIWULAN III
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI PADA PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Koba

Quality Management Representative,



DERIT WERDININGSIH, S.H.
NIP. 19784030 200502 2 002

Ketua Tim Survei,



ERWIN MARANTIKA, S.H.
NIP.19760302 201101 1 005

Ketua Pengadilan Negeri Koba,



RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.
NIP. 19770407 2003121 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III	9
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	16
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	18
BAB IV	19
PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Rekomendasi	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Pengadilan Negeri Koba.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan Pertriwulan atau empat (4) kali dalam satu tahun.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).
- Tim Survey mengarahkan responden atau pengguna layanan untuk mengisi Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Tim Survey mencetak dan menyusun Layanan Survey berdasarkan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

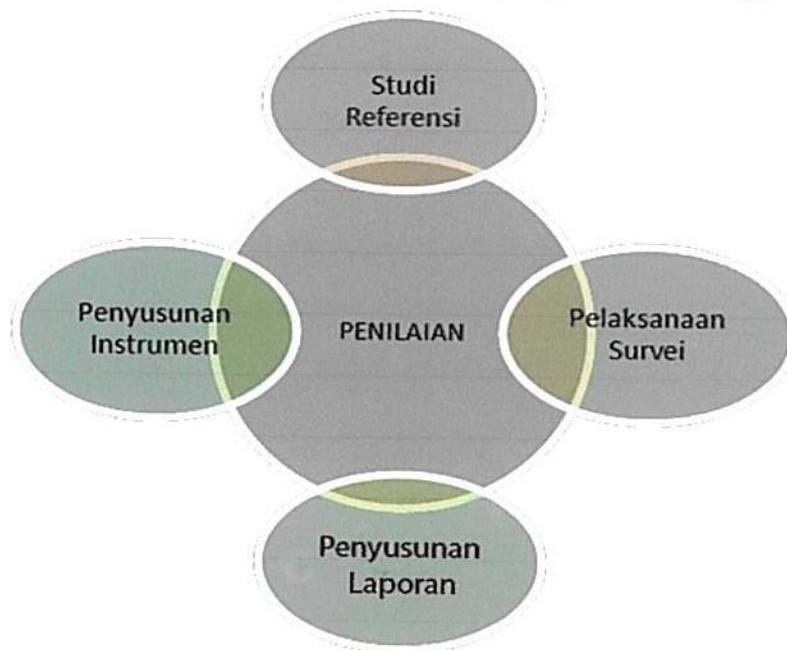
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

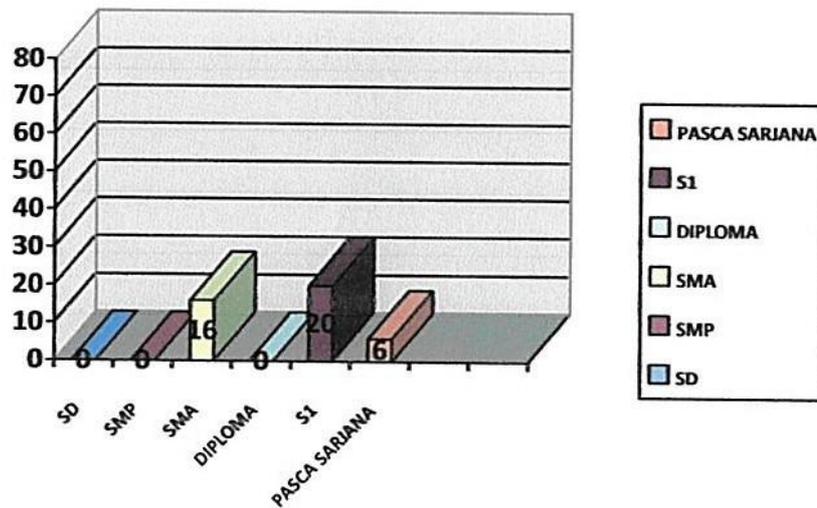
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar S1 dan SMA.

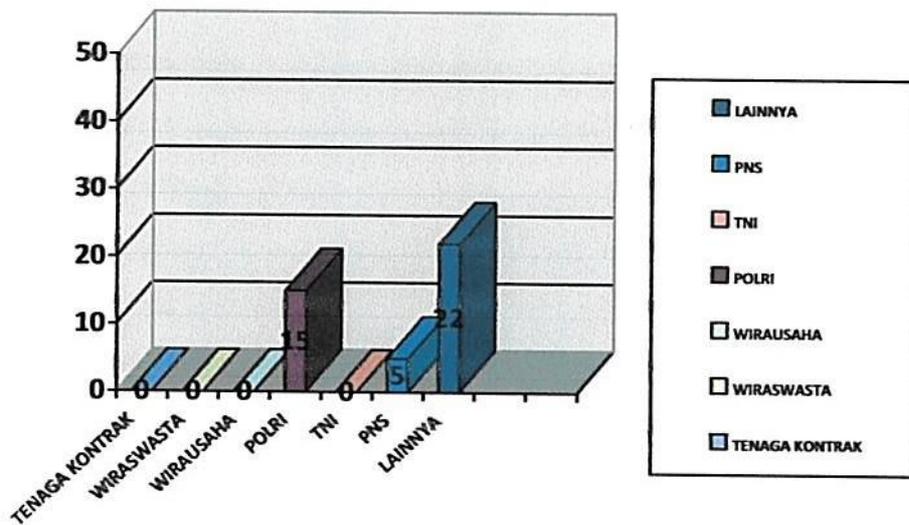
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 21% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai Lainnya.

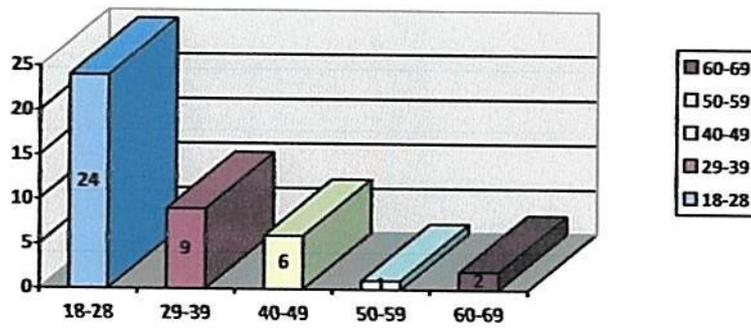
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden



3.1.3. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 69 tahun.

Tabel 7.
Usia responden



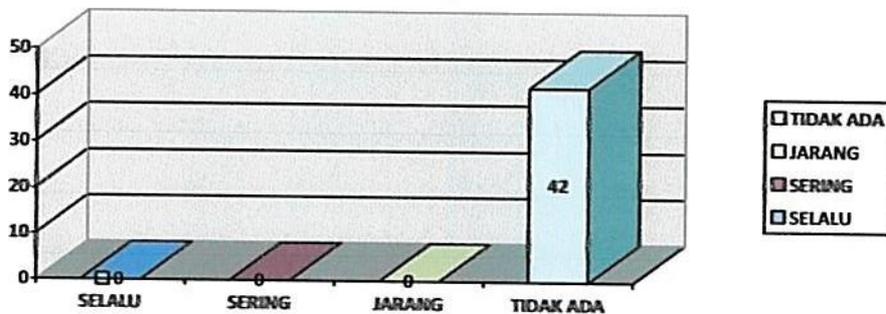
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 8.

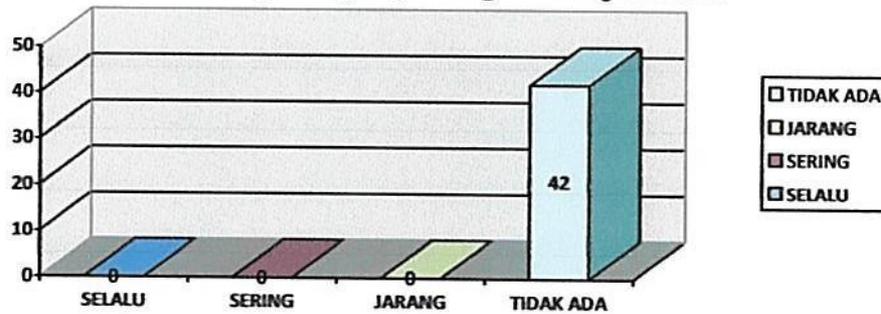
Indeks pada indikator manipulasi peraturan



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

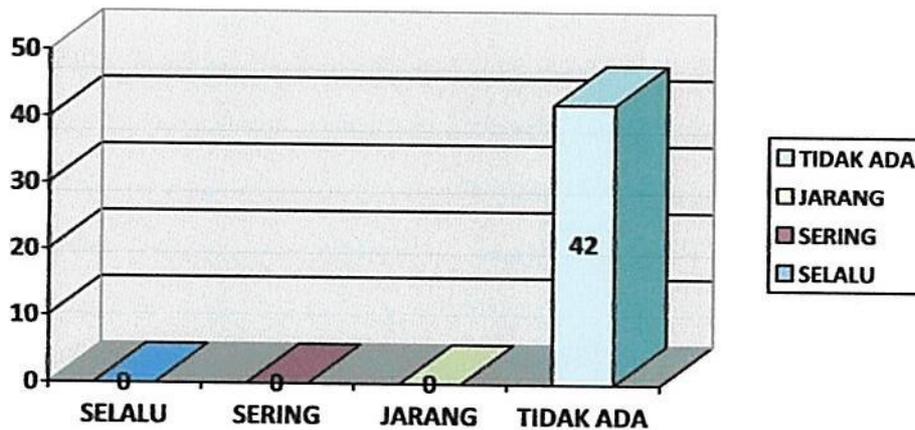
Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 10.
Indeks pada indikator menjual pengaruh



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 11.

Indeks pada indikator transparansi biaya

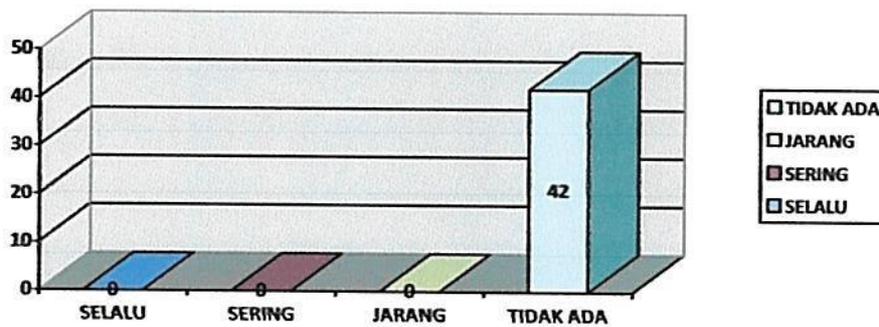


3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 12.

Indeks pada indikator tambahan biaya



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah



3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 3.976.

Tabel 14.

Indeks pada indikator transparansi pembayaran

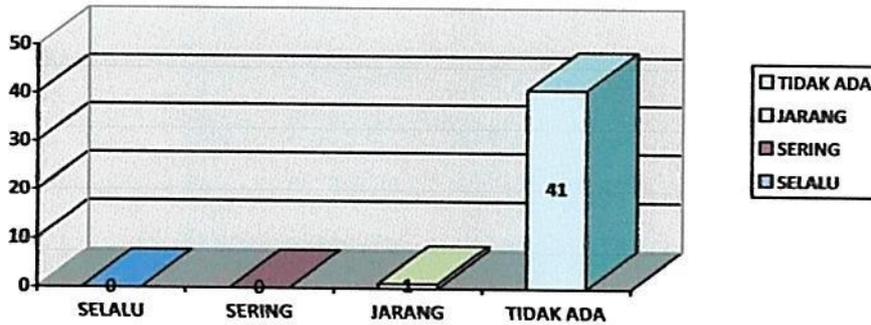


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3.976.

Tabel 15.

Indeks pada indikator percaloan

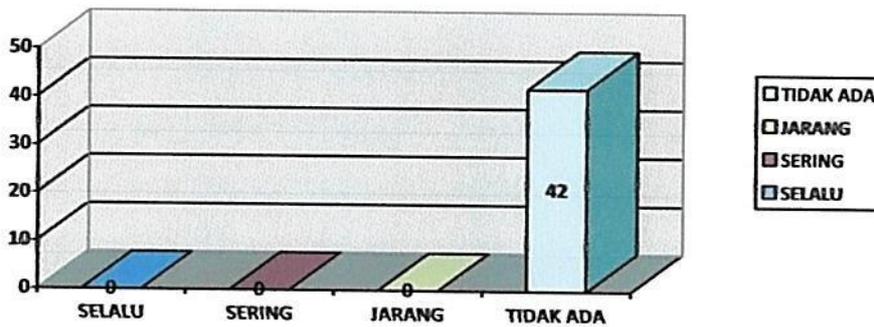


3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 16.

Indeks pada indikator perbuatan curang



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.000.

Tabel 17.

Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia



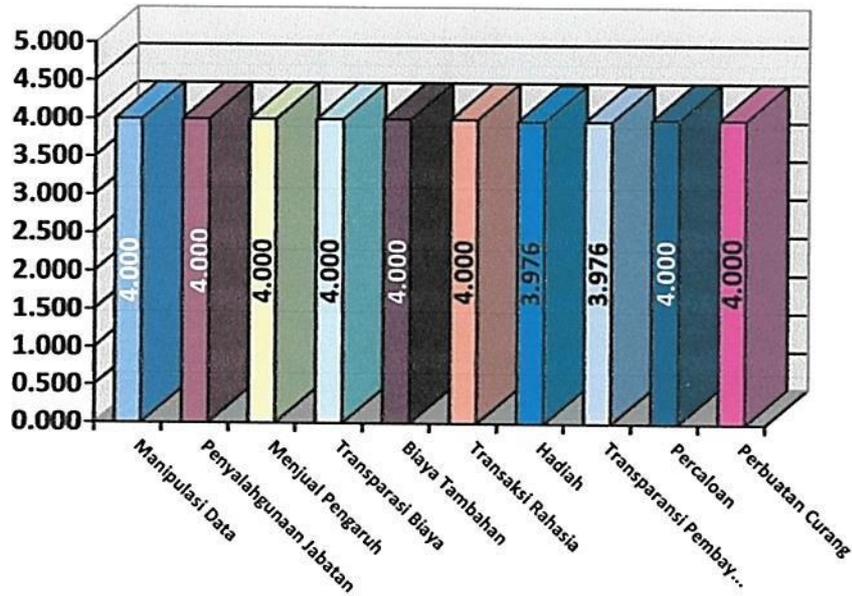
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II sebesar **4,00**.

Tabel 18.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

No	Ruang lingkup	NRR	NRR Tertimbang
1	Manipulasi Peraturan	4.000	0.400
2	Penyalahgunaan Jabatan	4.000	0.400
3	Menjual Pengaruh	4.000	0.400
4	Transparansi Biaya	4.000	0.400
5	Biaya Tambahan	4.000	0.400
6	Hadiah	4.000	0.400
7	Transparansi Pembayaran	3.976	0.398
8	Percaloan	3.976	0.398
9	Perbuatan Curang	4.000	0.400
10	Transaksi Rahasia	4.000	0.400
Jumlah		39.952	3.995



Indeks **4,00** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 81.26 – 100.00.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tingkatkan lebih baik lagi
2	Pelayanan pegawai pengadilan sangat puas
3	Tetap menjaga pelayan dengan ramah dan baik
4	Pelayanan yang diberikan sudah bagus
5	Tingkatkan fasilitas pelayan

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000
6. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000
7. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.976
8. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3.976
9. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4.000

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba Kelas II. Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **4,00** atau masuk pada persepsi **Bersih Dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Indikator Hadiah dan Indikator Transparansi Pembayaran memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

siSUPER (SPAK, SKM, HARIAN) | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	RITA MARIA R-401912- IPAK- B95C6B6F9F	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	33 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	30 Sepembe 2022
2	Verdi Irwntino R-401912- IPAK- 81F745AF29	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19 Sepembe 2022
3	Aldo R-401912- IPAK- ECC682535D	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Sepembe 2022
4	SUWANTO KAHIR R-401912- IPAK- 16045290C3	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	44 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Sepembe 2022
5	Aprita R-401912- IPAK- B0D57BE47F	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	36 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Sepember 2022
6	Bastian R-401912- IPAK- C54B553941	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	42 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5 Sepember 2022
7	SAPARWAN R-401912- IPAK- D07829F4CE	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	53 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29 Agustus 2022
8	RIZKI SAHRANA SYARIF R-401912- IPAK- 840CD816C6	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26 Tahun Perempuan	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2022
9	Silvi R-401912- IPAK- 8E905A2EEA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	47 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Agustus 2022
10	DAFITSON R-401912- IPAK- 96E65B1218	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	38 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Agustus 2022
11	Hengki R-401912- IPAK- 9F55763161	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Agustus 2022
12	Riski R-401912- IPAK- AB5826282B	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27 Tahun Perempuan	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Agustus 2022
13	Agandi R-401912- IPAK-	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Agustus 2022

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/ Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
	Darmawan R-401912- IPAK- 9BD6044DC6	BANGKA BELITUNG	Laki-laki												2022
28	Galan R-401912- IPAK- 6CF81EA192	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Agustus 2022
29	AHMAD ILHAM R-401912- IPAK- 1A24D7D6CA	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8 Agustus 2022
30	Endutra R-401912- IPAK- 8D46C0EDD3	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	27 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4 Agustus 2022
31	Gloria Iranita R-401912- IPAK- F9993468EC	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	28 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Agustus 2022
32	M.nuragil R-401912- IPAK- 5A930AC185	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	40 Tahun Laki-laki	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Agustus 2022
33	BUDIANA RAHMAWATI R-401912- IPAK- 375C3C8E3D	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	63 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3 Agustus 2022
34	Rudy Sitompul R-401912- IPAK- 253A89B94E	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	30 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	28 Juli 2022
35	Agandi R-401912- IPAK- 0AB095C0F1	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27 Juli 2022
36	BUDIANA RAHMAWATI R-401912- IPAK- 03B5480953	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	63 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26 Juli 2022
37	Siti Putri Dini R-401912- IPAK- 08E3DB5482	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	21 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Juli 2022
38	Ricky Rink Ramadhan R-401912- IPAK- EF5B11F095	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	25 Juli 2022
39	Fadli R-401912- IPAK- B661FA843D	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	32 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21 Juli 2022

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
40	Meifie Florenia R-401912- IPAK- EDF83E3E58	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	25 Tahun Perempuan	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	14 Juli 2022
41	Tara R-401912- IPAK- 984DF24D56	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	25 Tahun Laki-laki	SMUPNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12 Juli 2022
42	Mulyadi R-401912- IPAK- 7EF27BE511	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	26 Tahun Laki-laki	SMUPOLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7 Juli 2022



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Juli 2022 sampai 30 September 2022

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 99,88%

Jumlah	42 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 29 PEREMPUAN : 13	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 SD : 0 Diploma 3 : 0 SMP : 0 S1 : 20 SMU : 16 S2 : 6 Diploma 1 : 0 S3 : 0	
Pekerjaan	PNS : 5 SWASTA : 0 TNI : 0 WIRUSAHA : 0 POLRI : 15 TENAGA KONTRAK : 0 LAINNYA : 22	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP)	3,976
2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,976
3. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pengguna layanan PTSP Pengadilan Negeri Koba setelah diberikan billing PNBP oleh petugas bisa membayar sendiri baik melalui mesin EDC yang ada di Pengadilan maupun melalui badan-badan lain seperti kantor pos.

Gedung Pengadilan Negeri Koba telah dilengkapi dengan CCTV di berbagai tempat dan Para Pimpinan Pengadilan Negeri Koba tak henti-hentinya dalam setiap rapat untuk selalu mengingatkan agar seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Koba termasuk juga para honorer untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti percaloan dalam pengurusan layanan.

Petugas PTSP PN Koba dalam melaksanakan pemberian layanan kepada pengguna layanan PTSP telah dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur), juga setiap hari diadakan briefing PTSP oleh Supervisor dan Hakim Pengawas PTSP untuk mengetahui dan membahas jika ada kendala-kendala yang dihadapi dalam pelayanan, sehingga dengan demikian diharapkan pelayanan oleh petugas PTSP sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dapat meningkatkan kepuasan pengguna layanan PTSP.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

27 Oktober
2022
Ketua
Pengadilan
Negeri